

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA SELATAN

1. PETUGAS PERSIDANGAN

Desk : 2
 Provinsi : Papua Selatan
 Pimpinan Sidang 1 : Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana
 Pimpinan Sidang 2 : Direktur Pertahanan dan Keamanan
 Notulis Aplikasi : Zahra Haddad
 Notulis *Offline* : Luthfi Nashukha Dewi
 Pembahas : Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana

Pemerintah Daerah	Kementerian/Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas
1. <i>Bappeda Provinsi Papua Selatan</i>	1. <i>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</i> 2. <i>Kementerian Pertanian</i> 3. <i>Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</i> 4. <i>Kementerian Kesehatan</i> 5. <i>Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah</i> 6. <i>Badan Pangan Nasional</i>	1. <i>Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat</i> 2. <i>Direktorat Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi</i> 3. <i>Direktorat Pendidikan Tinggi, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</i> 4. <i>Direktorat Pangan dan Pertanian</i> 5. <i>Direktorat Perumahan dan Pemukiman</i> 6. <i>Direktorat Regional III</i> 7. <i>Direktorat Pengairan dan Irigasi</i> 8. <i>Direktorat Transportasi</i>

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA SELATAN

2. KESEPAKATAN DAN CATATAN PERSIDANGAN

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
1	Peningkatan Jalan BTS Kota Merauke, Kumbe, Bian dan Okaba	10	10	km	Kab. Merauke	Kementerian PUPR	Diakomodir, dengan catatan perlu segera upload Dokumen kesiapan lahan dan DED ke dalam aplikasi SiTIA serta pada TM harus dibuktikan dengan kesiapan seluruh		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)			Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA SELATAN

		<p>Bappeda Prov. Papua Selatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk ruas jalan BTS Kota Merauke, Kumbe, Bian dan Okaba merupakan ruas jalan provinsi - Kemantapan jalan sepanjang 35 km - Ruas jalan ini menghubungkan kab. Merauke dan Kab. Mappi - Terkait RC sudah disusun dengan bahu jalan 5 meter, namun berdasarkan ketentuan IJD adalah 5,5meter sehingga akan kami perbaiki terlebih dahulu - Untuk kesiapan lahan sudah siap dan sudah di ttd kepala daerah (Sudah di upload ke dalam KRISNA Selaras) 	<p>Biroren KemenPUPR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan tersebut merupakan kewenangan daerah, walaupun RC sudah siap. Siapa yang akan melaksanakan <p>Kementerian PPN/Bappenas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika masuk ke dalam IJD maka yang akan melaksanakan adalah KemenPUPR 	<p>Dit. Transportasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk ruas jalan tersebut merupakan ruas jalan provinsi serta memiliki akses strategis, akses menuju kab. Mappi - Lintasan masih di bawah 7meter serta memiliki kemantapan daerah - Kami mengusulkan untuk ruas jalan ini ke dalam Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun 2025 atau melalui DAK karena mempertimbangkan kesiapan daerah (RC) - RC yang perlu disiapkan: Lahan dan DED - Untuk pembukaan SiTIA tahap I sudah ditutup, untuk pembukaan aplikasi SiTIA tahap II akan dibuka bulan Oktober 	dokumen RC nya		
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
2	Peningkatan jalan okaba - bade	10	0	km	- Kab. Merauke - Kab. Mappi	Kementerian PUPR	Ditolak, dengan catatan agar diusulkan melalui DAK namun
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA SELATAN

		Program	Kegiatan	KRO	RO		
		Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	kebijakan DAK Tahun 2025 tidak tertampung agar diprioritas di Inpres Jalan Daerah Tahun 2026, serta masuk ke Diskresi Menteri PUPR untuk dibiayai dalam APBN	
Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas			
		<p>Bappeda Prov. Papua Selatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk ruas jalan okaba - bade memiliki panjang ruas jalan 120 Km (Merupakan ruas jalan provinsi) - Kemantapan jalan 5,6 km - Untuk ketidakmantapan jalan sebanyak 114 Km - Ruas jalan menghubungkan Kab. Merauke dan Kab. Mappi - Merupakan akses menuju Kawasan <i>food estate</i> yang merupakan salah satu kebijakan Presiden, jika tidak bias dianggarkan melalui DAK diharapkan bias diakomodir melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) karena menjadi salah satu prioritas <p>BPP Prov. Papua Selatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjadi jalan menuju Kawasan <i>food estate</i> dan menjadi 		<p>Dit. Transportasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruas jalan ini merupakan ruas lanjutan, sesuai Konreg ini masih ditangguhkan karena merupakan kewenangan daerah sehingga apabila ditangani melalui APBN maka akan sulit. - Disarankan untuk diusulkan melalui DAK - Saat ini fokus kami adalah mengikuti koridor jaringan jalan (yaitu Penanganan Jembatan Bian) mengingat keterbatasan anggaran 			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA SELATAN

		penghubung antara Kab. Merauke dan Kab. Mappi - Setwapres sangat mendukung usulan kegiatan ini karena merupakan kegiatan yang prioritas								
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan			
		Usulan	Kesepakatan							
3	Pengembangan kawasan tanaman kelapa sawit dan aneka palma (Kawasan Sagu)	2200		Ha	Kab. Mappi	Kementerian Pertanian	Diakomodir dengan catatan 1. 100 Ha akan dipenuhi 2. Sementara 200 Ha sisanya Pimsid dan Dit. Reg III Bersama Dit. PP dan Kementan mengupayakan supaya bisa diakomodir 300 Ha 3. Hal tersebut dilakukan			
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional				
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		11 - Stabilitas Ekonomi Makro				
		Program	Kegiatan	KRO		RO				
		Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	Sarana Pengembangan Kawasan		Kawasan Sagu				
		Catatan dan Tanggapan								
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas					
Bappeda Prov. Papua Selatan: - Kegiatan yang dimaksud merupakan perkebunan sagu di Mappi, karena sub kode yang tersedia tidak terdapat sagu	Kementerian Pertanian: - Untuk usulan ini RO Kawasan Sagu merupakan kesepakatan rakortek di Mappi, dengan kesepakatan 100 Ha, namun saat ini menyesuaikan kapasitas fiskal daerah		Dit. PP: - RO Kawasan sagu tahun 2025 ada yang berlokasi di Kab. Mappi, namun untuk luas lahan mengikuti Musrenbangtannas - Yang sudah tercatat sebesar 100 Ha							

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA SELATAN

		<ul style="list-style-type: none"> - Lokasinya berada di Distrik Moor (200 Ha untuk Lahan padi dan 300 Ha untuk lahan sagu) 	<ul style="list-style-type: none"> - RO disesuaikan menjadi "Kawasan Sagu" - Anggaran yang diperlukan untuk 100 Ha Kawasan sagu sebesar 570 Juta - Besaran 100 Ha merupakan besaran pada saat pagu ranwal, namun saat SBPI pagu mengalami penurunan - Kami akan mendiskusikan dengan rekan yang melakukan kunjungan lapangan - Usulan ini akan dipenuhi dengan catatan usulan tambahan yang akan diajukan kemenkeu menunggu approval Kemenkeu - Syarat: justifikasi dan dokumen pendukung yang berisi tujuan, rincian perhitungan, dan manfaat. Sehingga kami harus mencari posisi kunjungan pak Menteri baru bisa menyusun dokumennya - Usulan tambahan baru bisa dibahas ketika Musrenbang Kementan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dit.PP masih mengupayakan 100 Ha dahulu karena keterbatasan anggaran di tahun ini 	<p>mengingat tanah merupakan komponen yang sulit dipenuhi sehingga apabila sisa 200 Ha dikhawatirkan hilang</p> <p>4. Penyiapan 300 Ha untuk sagu sesuai dengan arahan Mentan dan wamenhan saat kunjungan</p>		
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
4	Pembangunan Sistem	1500		meter	Kab. Merauke	Kementerian PUPR	Ditolak

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA SELATAN

	Drainase Perkotaan Merauke	Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		15 - Lingkungan Hidup Berkualitas			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
Bappeda Prov. Papua Selatan: - Saat Rakortek mengusulkan 1500meter untuk Mappi, Merauke dan Boven Digoel - Dalam konreg usulan tersebut ditolak karena RO nya tidak sesuai, sehingga tetap dilanjutkan pengusulannya, namun diminta untuk menyiapkan koordinat berupa garis - Ditolak karena bukan prioritas		SDA, KemenPUPR: - Merupakan proyek baru, saat rakortek usulan ini ditolak, serta tidak diusulkan saat Konreg							
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
5		4		Kegiatan	Kab. Mappi	Kementerian Pertanian	Ditolak		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA SELATAN

Rehabilitasi Lahan Sawah	Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	
	02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		11 - Stabilitas Ekonomi Makro	
	Program	Kegiatan	KRO		RO	
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Perlindungan dan Penyediaan Lahan	Prasarana Pengembangan Kawasan		Lahan Pertanian Pangan Produktif (KSPP)	
	Catatan dan Tanggapan					
	Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas	
<p>Bappeda Prov. Papua Selatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan optimasi lahan namun lebih ke merehabilitasi lahan2 sawah dan lahan timbul yang telah dicetak namun tidak lagi aktif, - Berupa kegiatan <i>land clearing</i>, <i>land leveling</i>, dan kegiatan pemeliharaan sawah, dan kegiatan pasca panen - CPCL sudah ada - Titik koordinat sudah lengkap - Lahan yang terbengkalai awalnya didanai PBB dan keterbatasan anggaran - Petani ada namun semua dilakukan secara manual tanpa alsintan sehingga tebengkalai, 1 petani dapat mengelola ¼ atau 1/8 Ha 		<p>Kementerian Pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kami hanya mengikuti RO yang sudah ada, namun yang kami masukkan adalah RO yang ada nomenklturnya dan sesuai di Kab. Mappi - Untuk RO Rehabilitasi lahan sawah tidak ada di Kementan - Untuk <i>Land clearing</i> belum ada RO yang mengakomodir di Kementan - Di Rakortek Kementan ada optimasi lahan baru dialokasikan di Kab. Merauke dan saat forum itu belum diusulkan untuk Kab. Mappi 		<p>Dit. PP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terkait RO cantolan di KRISNA selaras masih dimasukkan ke KSPP, sementara lokasi rehabilitasi sawah ada di Kab. Mappi yang bukan merupakan wilayah KSPP - Lokasi KSPP di Prov. Papua Selatan hanya di Kab. Merauke 		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA SELATAN

		<ul style="list-style-type: none"> - Jika merujuk KSPP adalah ketika belum ada DOB untuk lokasi KSPP hanya Merauke, namun setelah ada DOB seharusnya Kab. Mappi juga bisa masuk - Untuk land clearing bisa dianggarkan APBD namun tidak keseluruhan lahan 							
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
6	Peningkatan jalan Bade - Gimikia - Tagaimon - Linggua	10		Km	Kab. Mappi	Kementerian Pertanian	Ditolak dengan catatan agar diusulkan melalui DAK namun kebijakan DAK Tahun 2025 tidak tertampung agar diprioritas di Inpres Jalan		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA SELATAN

		<p>Bappeda Prov. Papua Selatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruas jalan ini merupakan ruas jalan provinsi dengan Panjang 82 km dengan kemantapan jalan 7,1 km - Ruas jalan ini di wilayah kab. Mappi menghubungkan 4 kampung (Bade, Gimikia, Tagaimon, dan Linggua) - Selama ini masyarakat di 4 kampung ini untuk mengakses Kab. Mappi masih menggunakan <i>speedboat</i> - Terdapat daerah di Kab. Mappi yang aksesnya hanya berupa rawa, sehingga masyarakat masih kesulitan untuk mengakses ke fasilitas pelayanan dasar (Salah satu akibatnya: angka kematian ibu yang tinggi) <p>BPP Prov. Papua Selatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah pusat mengharapkan penurunan angka stunting, maka salah satu solusi adalah penanganan akses di daerah 		<p>Dit. Transportasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruas jalan ini di dalam Konreg masih ditangguhkan karena merupakan kewenangan daerah, sehingga agar diusulkan melalui DAK namun kebijakan DAK Tahun 2025 tidak tertampung agar diprioritas di Inpres Jalan Daerah Tahun 2026 	Daerah Tahun 2026		
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA SELATAN

7	Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan strategis provinsi	20	0	Liter/detik	Prov. Papua Selatan	Kementerian PUPR	Ditolak, dengan catatan apabila masih prioritas bias diusulkan kembali di tahun 2026		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		15 - Lingkungan Hidup Berkualitas			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Air Minum yang Layak		Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman			Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota	
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Bappeda Prov. Papua Selatan: - SPAM di Kawasan strategis provinsi, tidak masuk di Kawasan DOB namun kami usul di lintas kabupaten yaitu Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, dan Kab. Mappi - Kami sudah menyampaikan titik koordinat, DED, dan RAB		Cipta Karya, KemenPUPR: - Masih belum ada penjelasan mengenai posisi Kawasan strategis yang dimaksud - Kami belum menerima pengajuan usulan terkait SPAM 20 liter/detik - Yang sudah kami terima: SPAM Salor (KPP Perkantoran); SPAM Tanah Miring (perluasan); dan SPAM RAwa Biru Merauke (Pembangunan ipa baru 50 liter/det) - Data pendukung belum diinput provinsi					
Usulan	Volume			Satuan					

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA SELATAN

No	Usulan	Kesepakatan	Unit	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
8	Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat (IPAL) di kawasan strategis provinsi	35.200	0	Unit	Prov. Papua Selatan	Kementerian PUPR	Ditolak, karena RC dan kejelasan usulan perlu ditingkatkan kualitasnya	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		15 - Lingkungan Hidup Berkualitas		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu		
		Catatan dan Tanggapan						
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas		
		Bappeda Prov. Papua Selatan: - Sudah kami hitung untuk kebutuhan SPALD setempat (dari 4 kabupaten dengan mengambil sampel KK tiap distrik) - Volume yang diinput merupakan jumlah KK - SPALD yang diusulkan merupakan SPALD setempat, SPALD pusat belum bias karena terkendala lahan BPP Prov. Papua Selatan:				Dit. Perkim: - Saat Rakortek, kami merekomendasikan IPLT setempat, namun yang diusulkan saat Rakortek hanya kab. Mappi - Untuk SPALD baik terpusat maupun setempat satuannya adalah KK, namun ke depan apabila mengusulkan SPALD sebaiknya mengusulkan per kabupaten/kota		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA SELATAN

		- Perlu dipastikan kesiapan lahan sehingga usulan bias diusulkan			- RC perlu dilengkapi dan dikonsultasikan terlebih dahulu ke Balai				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
9	Pembangunan sumur air tanah untuk air baku	13	13	Titik	Prov. Papua Selatan	Kementerian PUPR	Diakomodir dengan catatan RC perlu diperhatikan dan dikomunikasikan dengan Ditjen Cipta Karya KemenPUPR		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		15 - Lingkungan Hidup Berkualitas			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Ketahanan Sumber Daya Air	Pengembangan Jaringan Air Tanah an Air Baku	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air		Prasarana air baku yang dibangun			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas				
	BPIW KemenPUPR: - Ada beberpa kekhususan yang terkait dengan pendukung Ibukota Provinsi, berdasarkan hasil rapat dengan Kemendagri: untuk penyelesaian dokumen RC ibukota DOB, Papua Selatan		Dit. SDA: - Untuk Papua Selatan ada pembangunan sumur air tanah baku di 13 titik dengan kesiapan daerah sudah siap RC nya - Berdasarkan hasil rakortek, merencanakan pembangunan						

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA SELATAN

			<p>perlu dukungan untuk infrastruktur.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk pembangunan KPP (Perkantoran) dimulai 2024, sehingga perlu ada prioritas untuk pembangunan infrastruktur dasar 		<p>sumur bor di 13 titik di 4 kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum berkoordinasi dengan BWS Merauke - Hasil geotagging di aplikasi KRISNA hanya terletak di Kab. Mappi - Untuk RC air baku: Kesiapan RC, project MYC, neraca air baku, masuk Kawasan prioritas menurut RPJMN 2020-2024 - Untuk neraca air baku Prov. Papua Selatan kapasitas air baku 2024 sebesar 0,232m³/detik; kebutuhan air baku 2024 sebesar 0,36m³/detik - Untuk Kawasan prioritas RPJMN 2020-2024 ada persyaratan sebagai berikut: Pulau kecil terluar, 3T, Kawasan strategis (KEK, KI, KSPN, dan Pantura), Daerah aglomerasi/perkotaan - Sudah ada SPAM, EKSTING, DAN terdapat <i>Idle Capacity</i> pada unit produksi sehingga memerlukan tambahan supply air baku - Usulan diakomodir 		
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA SELATAN

10	Pembangunan rumah sehat yang di lengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil dan terluar	200	200	Unit	Prov. Papua Selatan	Kementerian PUPR	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		15 - Lingkungan Hidup Berkualitas			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni		Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman			Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya	
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
Bappeda Prov. Papua Selatan: - Sepakat dengan penyesuaian RO menjadi "Rumah Khusus"				Dit. Perkim: - Tetap diakomodir namun perlu merubah RO dari "Bantuan Stimulan Rumah Swadaya" menjadi "Rumah Khusus" sebagaimana catatan pada saat Forum Rakortekrenbang - RO yang tepat adalah "Rumah khusus" alih-alih rumah swadaya untuk memenuhi sarana dan prasarananya					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA SELATAN

11	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi	1		Kegiatan	Prov. Papua Selatan	Kemendikbud	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		04 - Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		02 - Pendidikan Berkualitas yang Merata			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		Program Pendidikan Tinggi	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi		Bantuan Pendidikan Tinggi			Mahasiswa Yang mendapatkan KIP Kuliah	
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		-		-		Catatan sama seperti Rakortekrenbang			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan			a			
12	Pendayagunaan tenaga kesehatan	1		Kegiatan	Prov. Papua Selatan	Kementerian Kesehatan	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		01 - Transformasi Sosial		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		01 - Kesehatan untuk Semua			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA SELATAN

		Program	Kegiatan	KRO	RO			
		Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	Pelayanan Publik kepada masyarakat	Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pada Fasyankes Primer di wilayah Papua (SDM-22)			
Catatan dan Tanggapan								
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas				
		-	-	Catatan sama seperti Rakortekrenbang				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
13	Pembiayaan JKN/KIS	1		Kegiatan	Prov. Papua Selatan	Kementerian Kesehatan	Diakomodir	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		01 - Transformasi Sosial		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		01 - Kesehatan untuk Semua		
		Program	Kegiatan	KRO	RO			
		Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Pembiayaan JKN/KIS	Bantuan Masyarakat	Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS (PK)			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA SELATAN

		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		-		-		Catatan sama seperti Rakortekrenbang			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
14	Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian	52		Unit	- Kab. Merauke Kab. Mappi	Kementerian Pertanian	Diakomodir dengan volume disesuaikan dengan keuangan negara		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA SELATAN

		<p>Bappeda Prov. Papua Selatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan ini merupakan dukungan untuk perkembangan persawahan berupa alsintan yaitu alat pasca panen, kontraktor, dan pompa air - Gapoktan dan CPCL sudah ada - Usulan yang dimaksud merupakan alat mesin pra panen 	<p>Kementerian Pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terkait usulan ini berdasarkan hasil rakortek ada RO untuk alat mesin pertanian (alat mesin pra panen), namun konfirmasi daerah juga diusulkan mesin pertanian pasca panen, sehingga yang diakomodir adalah alat pra panen saja - Untuk volume belum dapat disepakati karena Pagu Indikatif yang jauh dengan Pagu Ranwal - Untuk RO perlu disesuaikan menjadi "Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Subsektor Tanaman Pangan" 				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
15	Pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan	2	2	Unit	- Kab. Mappi	Kementerian Pertanian	Diakomodir dengan catatan penerima alsintan pasca panen bisa dipastikan bahwa CPCL nya berada di Kawasan <i>Food Estate</i>
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	
		Program	Kegiatan	KRO	RO		
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA SELATAN

		Catatan dan Tanggapan					
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas			
		<p>Bappeda Prov. Papua Selatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usulan yang dimaksud merupakan alsintan pasca panen - Daerah <i>Food estate</i> di Kab. Merauke, sementara di Kab. Mappi juga ada pengembangan sawah untuk mengatasi kerawanan pangan seluas 200 Ha <p>BPP Prov. Papua Selatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diharapkan kegiatan ini dapat diakomodir karena menjadi agenda nasional, serta Papua Selatan akan menjadi lumbung pangan nasional 	<p>Kementerian Pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk usulan ini berdasarkan hasil rakortek disepakati, serta pagu indikatif lebih kecil dari pagu ranwal maka tidak diakomodir - Papua Selatan belum pernah mendapatkan alsintan pasca panen karena merupakan DOB <p>Kementerian PPN/Bappenas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diakomodir dengan catatan penerima alsintan pasca panen bisa dipastikan bahwa CPCL nya berada di Kawasan <i>Food Estate</i> 	<p>Dit. PP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prov. Papua Selatan menjadi Kawasan KSPP - Terdapat pengurangan anggaran untuk tahun ini sehingga untuk alat dan mesin pasca panen belum bisa diakomodir - Untuk 2025, Kawasan FE yang mendapat alsintan pasca panen adalah Maluku - Untuk RO tersebut kami pastikan dapat diakomodir, namun lokasi CPCL nya berada di Kawasan <i>Food Estate</i> 			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
16	Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak	1		Kegiatan	Kab. Asmat	Kementerian Pertanian	Diakomodir
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	
		Program	Kegiatan	KRO		RO	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA SELATAN

		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Bantuan Hewan	Ternak Unggas			
Catatan dan Tanggapan								
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas				
		-	-	Catatan sama seperti Rakortekrenbang				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
17	Pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan	2		Kegiatan	- Kab. Merauke - Kab. Boven Digoel - Kab. Mappi - Kab. Asmat	Badan Pangan Nasional	Ditolak dengan catatan RO "Penyaluran Bantuan Pangan" merupakan direktif Presiden dan hanya berlaku sampai Juni 2024	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		Sarana Logistik Pangan		
		Catatan dan Tanggapan						

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA SELATAN

No	Usulan	Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan	Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	
		<p>Pemerintah Daerah</p> <p>Bappeda Prov. Papua Selatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ditujukan ke Badan Pangan Nasional, karena kami memiliki kerawanan pangan cukup tinggi sementara ketersediaan pangan di daerah kami cukup terbatas - Untuk daerah rawan pangan yang memungkinkan adalah logistik pangan (pengadaan beras), sehingga kegiatannya adalah bansos beras - Kegiatan ini berbeda dengan dan yang dianggarkan dari dana dekonsentrasi terkait "Pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan" 		<p>Kementerian Lembaga</p> <p>Badan Pangan Nasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pertanian Papua Selatan dapat berkoordinasi terkait komoditas yang akan dipasarkan - Tidak terdapat kegiatan Logistik - Kami ada dekonsentrasi yang dialokasikan 38 Provinsi - Di Bapanas terdapat RO "Penyaluran Bantuan Pangan" menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kemenko PMK di tahun 2024 sesuai arahan Presiden hanya sampai bulan Juni 2024, Tahun 2025 kami tidak bisa memastikan apakah masih ada atau tidak <p>Dit. Reg III Bappenas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kami mendorong untuk ketahanan pangan local seperti sagu, padi di Merauke di dokumen RAPPP Tahun 2025-2029 		<p>Direktorat Sektor Bappenas</p> <p>Dit. PP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terkait ketersediaan aspek konsumsi pangan dengan RO "Logistik Pangan", namun setelah dicek tidak termasuk wilayah Merauke 	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA SELATAN

18	Pendampingan dan peningkatan kualitas SDM usaha mikro	1		Kegiatan	Prov. Papua Selatan	Kementerian Koperasi dan UKM	Diakomodir, menggunakan skema pendanaan APBN regular, serta Dinas Koperasi segera menyampaikan proposal ke Kemenkop UKM dan berkoordinasi dengan Direktorat PUKMK		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM			Usaha Mikro Berbasis Kompetensi yang menerima pelatihan	
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Bappeda Prov. Papua Selatan: - Fokus kegiatan ini untuk OAP, untuk dilakukan pelatihan sekaligus pendampingan di 4 kab - Sebaiknya melalui pendanaan regular (APBN), untuk besaran volume akan dikoordinasikan dengan Kemenkop UKM		Kemenkop UKM: - Diakomodir namun skema pendanaan diarahkan melalui DAK - Untuk DAK non Fisik, kesempatan untuk mendapatkan kegiatan ini lebih besar - Untuk APBN, melalui pengajuan proposal yang ditujukan ke Kemenkop UKM - Melihat evaluasi 2022 dan 2023, Papua Selatan mendapatkan hak prioritas, serta merupakan daerah 3T		Dit. PUKMK: - Usulan ini berdasarkan hasil olahan Dit. PUKMK dapat diakomodir melalui RO 445-Usaha Mikro berbasis kompetensi dan pelatihan, namun perlu konfirmasi ke Kemenkop UKM - Terkait DAK non fisik sampai saat ini belum ada kebijakannya, sebaiknya bisa dimasukkan ke dalam APBN			
Usulan	Volume			Satuan					

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA SELATAN

No	Usulan	Kesepakatan	Kegiatan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
19	Penguatan pengelolaan dan perlindungan usaha mikro	1		Kegiatan	Prov. Papua Selatan	Kementerian Koperasi dan UKM	Diakomodir, agar dinas koperasi berkoordinasi dengan Kemenkop UKM untuk melengkapi RC, Dit PUKMK perlu mengawal saat TM agar tetap masuk (Diberlakukan secara umum untuk OAP dan Non-OAP, serta kebijakan afirmasi untuk OAP dilakukan berdasarkan presentase CPCL yang ditentukan Dinas dan Bappeda)	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
		Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	Penguatan Pengelolaan dan Perlindungan Usaha Mikro	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		Usaha Mikro yang difasilitasi penerbitan izin usaha (Nomor Induk Berusaha/NIB)		
		Catatan dan Tanggapan						
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas		
		Bappeda Prov. Papua Selatan: - Di Papua Selatan banyak usaha yang belum memiliki NIB, sehingga kami focus pada pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha (Khusus OAP)		Kemenkop UKM: - Bisa diakomodir dengan catatan perlu menyampaikan proposal (Usaha2 mana saja yang perlu didampingi, CPCL <i>by name by address</i> , serta portofolio pelaku usaha) - NIB diterbitkan oleh KTSP, sehingga perlu koordinasi dengan OPD terkait		Dit. PUKMK: - Terkait usulan ini bisa diakomodir dengan regular APBN dengan RO "Usaha Mikro yang difasilitasi izin usaha/NIB"		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA SELATAN

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
20	Pengembangan SDM UMKM	1	0	Kegiatan	Prov. Papua Selatan	Kementerian Koperasi dan UKM	Ditolak dengan catatan sudah diakomodir di Usulan "Penguatan pengelolaan dan perlindungan usaha mikro"		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	Pengembangan SDM UMKM	Pendidikan Non Gelar		Pendamping UKM yang ditingkatkan Kompetensi dan Kapasitasnya sesuai SKKNI			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Bappeda Prov. Papua Selatan: - Tujuannya adalah untuk pendampingan usaha mikro untuk masyarakat non-OAP		Dit. Reg III - Kementerian PPN/Bappenas: - Sepakat RO yang ditujukan untuk OAP dan Non-OAP tidak perlu dibedakan		Dit. PUKMK: - Kegiatannya sama dengan usulan sebelumnya terkait "Penguatan pengelolaan dan perlindungan usaha mikro"			

3. REKAPITULASI

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA SELATAN

HASIL KESEPAKATAN	TOTAL USULAN BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN
Diakomodir	12
Ditolak	11
Tidak Terbahas	0